

KOORDINASI DAN KOLABORASI PENEGAKAN HUKUM TATA RUANG

Intervensi KPK di Sektor SDA & LH



2009

Telaah Kasus Khusus Migas



2011

- Kajian Kebijakan Pengusahaan Batubara
- TL Kajian Kawasan Hutan 2010



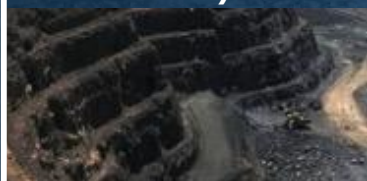
2010

Kajian Sistem Perencanaan dan Pengawasan Kawasan Hutan



2013

- Kajian Sistem Pengelolaan PNPB Minerba
- Kajian Sistem Perizinan SDA
- NKB Percepatan Penguatan Kawasan Hutan (Istana Negara, 11 Mar 2013)



2014

- Korsup Minerba
- Penandatanganan Deklarasi GNPSDA, Ternate 6 Juni 2014

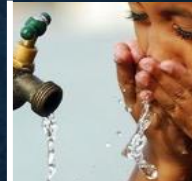


2014

Kajian Sistem Pengelolaan Ruang Laut dan Sumberdaya Kelautan

2015

- Korsup Minerba
- Kajian Sistem Pengelolaan PNPB Kehutanan
- Telaah Kasus Migas
- Telaah Kasus Listrik



2015

Penandatanganan Deklarasi GNP-SDA Istana Negara, 19 Mar 2015

2016

- Kajian Perkebunan
- Korsup Sawit
- Kajian Sistem Pengelolaan Sumberdaya Air

EVALUASI GNPSDA 2018

2017

Kajian Sistem Pengelolaan Kawasan Hulu Sumberdaya Air

2018

Kajian Sistem Tata Kelola Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Pemberantasan Korupsi Sektor SDA LH

Tantangan

(Evaluasi GNPSDA KPK 2018)

EVALUASI GNPSDA 2018

1

Kapasitas penegak hukum yang belum optimal

2

Koordinasi lintas sektor antar penegak hukum belum efektif

3

Penegakan hukum belum optimal, korupsi sektor SDA masih terjadi

4

Pengawasan penegakan hukum sektor SDA minim

Strategi

Kapasitas & Koordinasi

Knowledge sharing

Partisipasi Publik

Penguatan pengetahuan, kapasitas dan kemampuan penegak hukum

Tersedianya manajemen pengetahuan korupsi sektor SDA

Tersedianya rencana mitigasi resiko korupsi sektor SDA

Penguatan koordinasi antar penegak hukum

Peningkatan partisipasi publik

01

02

03

04

05

Program Peningkatan Kapasitas & Kolaborasi Penegakan Hukum Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi Sektor SDA

3 Tahun
di 12
Provinsi

2020 – 2022

Pelaksanaan Program

Des 2019

**Kick off dengan 11
Kementerian/Lembaga**



Okt 2019

**Kesepakatan KPK &
Pemerintah Norwegia
(implementing agency Auriga)**

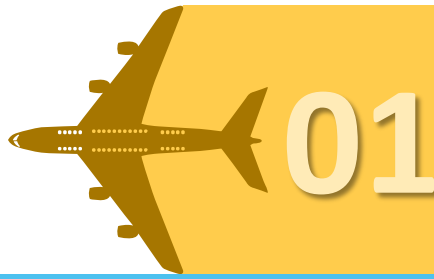
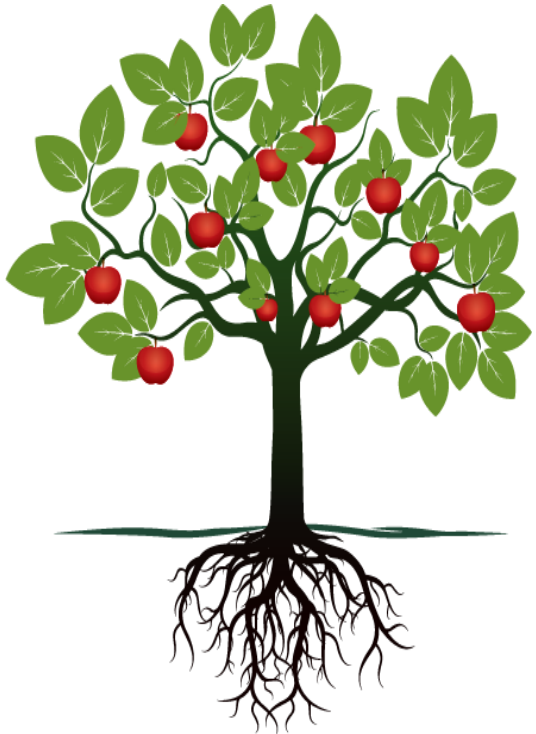


Durasi Kegiatan dan Wilayah

2020, 2021, 2022
3 tahun
di
Wilayah
12 Provinsi



Program Peningkatan Kapasitas & Kolaborasi Gakkum dalam rangka Pemberantasan Korupsi Sektor SDA (2020-2022)

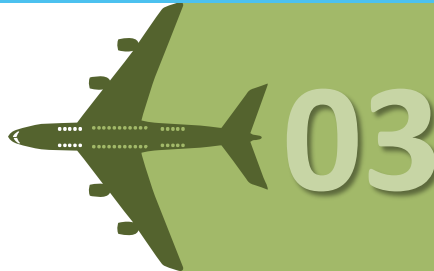


Penguatan Kapasitas Penegak Hukum

1. Training Need Analysis (TNA) untuk aparat penegak hukum
2. Modul bagi penegak hukum
3. Forum Diskusi Pemberantasan Korupsi di Sektor SDA untuk Penegak Hukum dan pemangku kepentingan terkait

Tersedianya Sistem Manajemen Pengetahuan

1. Penguatan pusat kajian anti korupsi di 12 provinsi
2. Penguatan jejaring anti korupsi (kampus dan CSO)
3. Publikasi working paper terkait isu-isu anti korupsi dan tata kelola di sektor SDA



Tersedianya Rencana Mitigasi Resiko Korupsi Sektor SDA

1. Kajian Kerentanan Korupsi/Resiko korupsi (Corruption Risk Assessment) di sektor SDA

Penguatan Koordinasi Antar Penegak Hukum

1. Kajian model sinergi antar lembaga penegak hukum
2. *Piloting* penanganan kasus bersama antar lembaga penegak hukum
3. Platform manajemen pengetahuan berbasis teknologi informasi



Peningkatan Partisipasi Publik

1. Peningkatan kapasitas jurnalis dan media
2. Modul untuk pelatihan investigasi kepada CSO dan jurnalis.
3. Platform jurnalisme warga untuk kasus korupsi sektor SDA (bakarbatu.id)
4. Platform monitoring kasus korupsi untuk publik

Kajian Sistem Perencanaan Hutan (2010)

1. Tumpang tindih IUP di dalam kawasan hutan. Di Kalimantan, potensi kerugian mencapai 15,9T.
2. Perbedaan acuan terhadap kawasan hutan.
3. Informasi spasial menjadi instrumen untuk melakukan kejahatan korupsi karena asimetri informasi, misalokasi ruang, dan rent-seeking.

NKB Percepatan Pengukuhan (2013)

Persoalan ketidakpastian hukum berkaitan dengan keadilan alokasi kawasan hutan, tumpang tindih regulasi SDA, dan konflik.

Korsup Minerba (2014)

Di 12 Provinsi, konsolidasi data menemukan 1,3 juta hektar IUP di dalam kawasan Hutan Konservasi. Sementara hutan lindung 4,9 juta ha. Total di dalam kawasan hutan 25,9 juta ha.

NKB GNPSDA (2015)

1. Sinergi penyelesaian persoalan sumber daya alam lintas sektor.
2. Penyelesaian persoalan SDA perlu didorong berdampak di tingkat tapak.

Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit (2016)

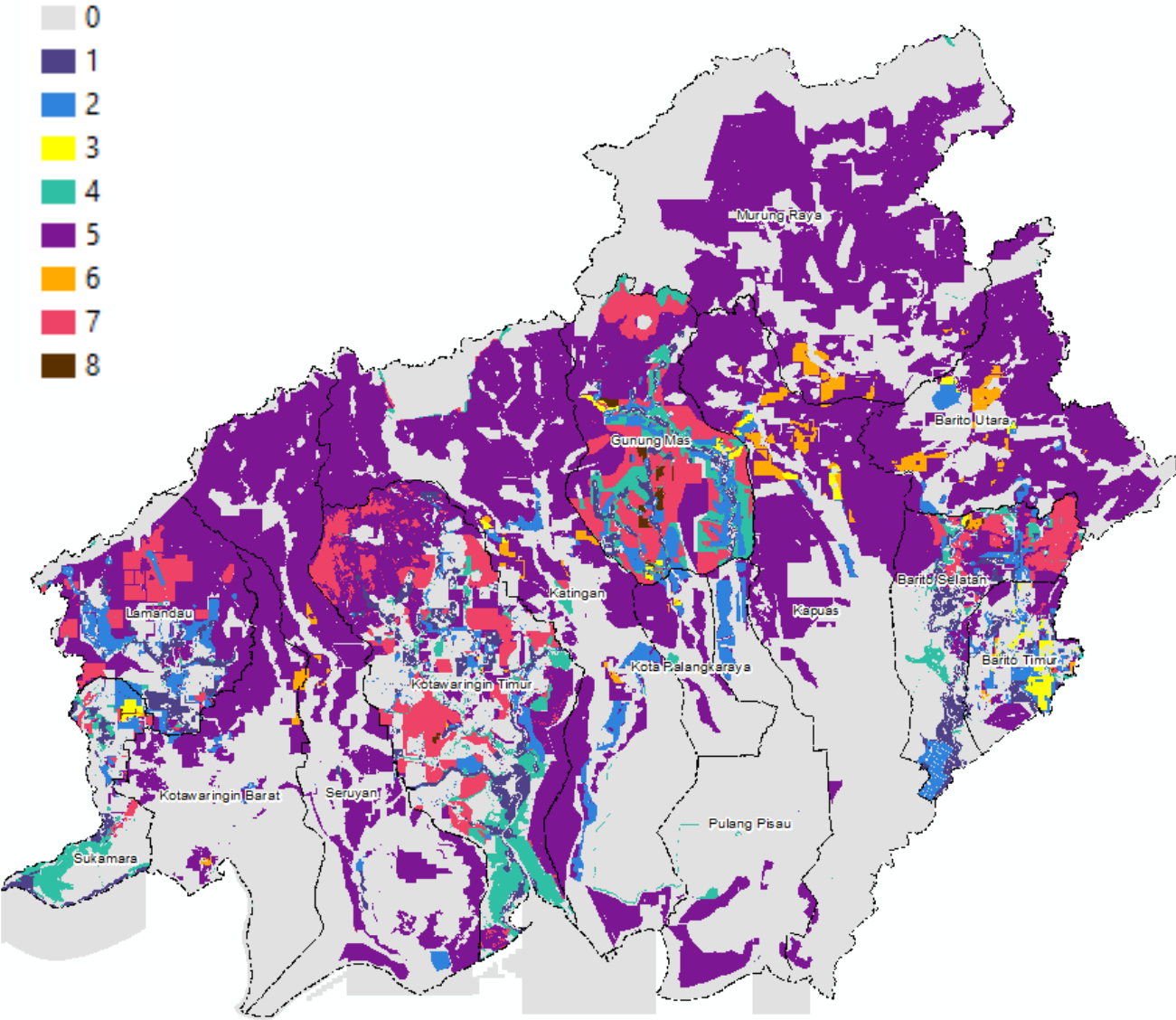
- a. Sistem pengendalian dalam perizinan perkebunan kelapa sawit tidak akuntabel.
 - Tumpang tindih peta HGU perkebunan kelapa sawit dengan:
 - ✓ Izin pertambangan (3,01 juta ha)
 - ✓ IUPHHK-HTI (534 ribu ha)
 - ✓ IUPHHK-HA (349 ribu ha)
 - ✓ Kubah Gambut (801 ribu ha)
- b. Tidak efektifnya pengendalian pungutan ekspor komoditas kelapa sawit.
- c. Tidak optimalnya pungutan pajak sektor kelapa sawit oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Tipologi Tumpang Tindih/Ketidaksesuaian



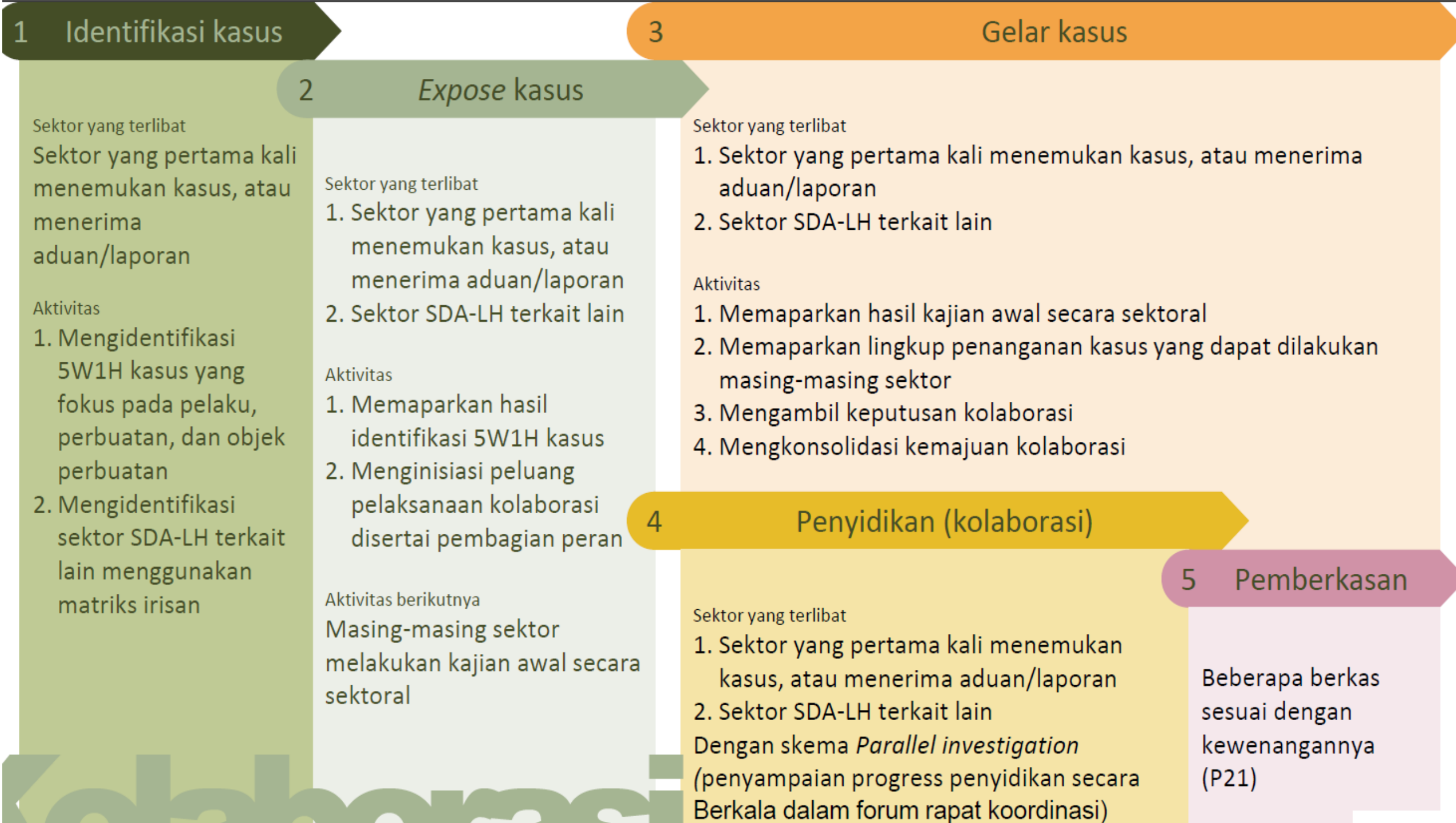
1. Ketidaksesuaian RTRW (RTRW-P dan RTRW-K) di Non-Kawasan Hutan
2. Ketidaksesuaian Izin/Hak Atas Tanah pada RTRWP dan RTRWK Non-Kawasan Hutan yang belum selaras
3. Tumpang tindih yang melibatkan beberapa Izin/Hak Atas Tanah pada RTRWP dan RTRWK Non-Kawasan Hutan yang belum selaras
4. Ketidaksesuaian RTRW (RTRW-P dan/atau RTRW-K) dengan Kawasan Hutan
5. Ketidaksesuaian Izin/Hak Atas Tanah pada Tatakan (RTRW dan Kawasan Hutan) yang sudah selaras
6. Tumpang tindih yang melibatkan beberapa Izin/Hak Atas Tanah pada Tatakan (RTRW dan Kawasan Hutan) yang sudah selaras
7. Ketidaksesuaian Izin/Hak Atas Tanah pada Tatakan (RTRW dan kawasan hutan) yang belum selaras
8. Tumpang tindih yang melibatkan beberapa Izin/Hak Atas Tanah pada Tatakan (RTRW dan kawasan hutan) yang belum selaras

Luas (Ha) Tipologi Tumpang Tindih/Ketidaksesuaian Izin/Hak Atas Tanah dengan Rencana Tata Ruang dan Kawasan Hutan di Kalimantan Tengah



Kode Tipologi	Deskripsi Tipologi	Luas (Ha)	Persentase
1	Ketidaksesuaian RTRW (RTRW-P dan RTRW-K) di Non-Kawasan Hutan	390,685.98	5%
2	Ketidaksesuaian Izin/Hak Atas Tanah pada RTRWP dan RTRWK Non-Kawasan Hutan yang belum selaras	503,036.64	6%
3	Tumpang tindih yang melibatkan beberapa Izin/Hak Atas Tanah pada RTRWP dan RTRWK Non-Kawasan Hutan yang belum selaras	60,443.13	1%
4	Ketidaksesuaian RTRW (RTRW-P dan/atau RTRW-K) dengan Kawasan Hutan	413,496.16	5%
5	Ketidaksesuaian Izin/Hak Atas Tanah pada Tatakan (RTRW dan Kawasan Hutan) yang sudah selaras	5,752,602.62	71%
6	Tumpang tindih yang melibatkan beberapa Izin/Hak Atas Tanah pada Tatakan (RTRW dan Kawasan Hutan) yang sudah selaras	132,655.59	2%
7	Ketidaksesuaian Izin/Hak Atas Tanah pada Tatakan (RTRW dan kawasan hutan) yang belum selaras	790,066.35	10%
8	Tumpang tindih yang melibatkan beberapa Izin/Hak Atas Tanah pada Tatakan (RTRW dan kawasan hutan) yang belum selaras	19,705.77	0%

Perusahaan	RTRW Kota Sorong 2014	RZWP3-K Papua Barat	Pelanggaran
PT. BAGUS JAYA ABADI	1. Hutan Produksi Terbatas; 2. Sepadan Pantai	1. KSN Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati (KSN09) 2. Wisata Alam Pantai	- Pelanggaran ruang - Hingga tahun 2013 merupakan Kawasan mangrove dengan luas 1,7 Ha. Kini sudah direklamasi dan terdapat limpasan batuan dari tambang di bibir pantai.
PT. PRO INTERTECH INDONESIA	1. Hutan Produksi Terbatas; 2. Sepadan Pantai	1. KSN09 2. Wisata Alam Pantai	- Pelanggaran ruang - Tahun 2005 merupakan kawasan perairan dengan luas 4,37 Ha. Kini berganti dengan dermaga
PT. DAVICO ENGINEERING	1. Hutan Produksi Terbatas; 2. Sepadan Pantai	1. KSN09 2. Wisata Alam Pantai	- Pelanggaran ruang - Tidak ada reklamasi
PT. AKAM	1. Pemukiman Kepadatan Rendah; 2. Sepadan Pantai	1. KSN09 2. Wisata Alam Pantai	- Pelanggaran ruang - Merupakan Kawasan Mangrove sampai 2007 dengan luas 3,34 Ha
PT. LINTAS ARTHA LESTARI	1. Hutan Produksi Terbatas; 2. Sepadan Pantai	1. KSN09 2. Wisata Alam Pantai	- Pelanggaran ruang - Terjadi pengurangan tutupan vegetasi di pesisir, tidak terjadi reklamasi





Terima Kasih!

“Penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas. Baik itu administratif, perdata maupun pidana. Siapapun pemiliknya!”

Presiden Joko Widodo

Rakornas Pengendalian Kebakaran
Hutan dan Lahan

(6 Februari 2020)